

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah)

Muhammad Ridha<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Haris Fadillah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [ahmadridha286@gmail.com](mailto:ahmadridha286@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Sungai Pandan dengan studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan 13 orang informan yang dipilih secara purposive, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis implementasi kebijakan didasarkan pada model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Pandan belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada Desa Hambuku Pasar masih ditemukan keterbatasan dalam aspek sosialisasi kebijakan, ketersediaan anggaran dan sarana sanitasi, serta belum diterapkannya sanksi secara tegas, sehingga sebagian masyarakat masih melakukan BABS di sungai. Sementara itu, Desa Hambuku Tengah menunjukkan implementasi yang lebih baik dengan telah ditetapkannya sebagai Desa STBM dan dinyatakan 100% Stop BABS, meskipun masih terdapat jamban di sungai yang digunakan untuk keperluan selain buang air besar. Faktor penghambat implementasi kebijakan meliputi keterbatasan anggaran, sarana sanitasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya komitmen aparat desa, dukungan tenaga kesehatan, dan kerja sama antar pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah desa meningkatkan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, memperkuat dukungan anggaran dan sarana prasarana jamban sehat, serta menerapkan standar operasional prosedur dan sanksi secara konsisten agar tujuan kebijakan Stop BABS dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, peraturan daerah, stop BABS, sanitasi lingkungan

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 4 of 2016 concerning the Stop Open Defecation (Stop BABS) policy in Sungai Pandan District, with case studies in Hambuku Pasar Village and Hambuku Tengah Village. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, involving 13 informants selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data credibility was ensured using source and technique triangulation. The analysis of policy implementation is based on the Van Meter and Van Horn model, which includes policy standards and objectives, resources, inter-organizational relationships, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and implementor disposition. The results indicate that the implementation of the Stop BABS policy in Sungai Pandan District has not been fully optimal. In Hambuku Pasar Village, limitations were found in policy socialization, availability of budget and sanitation facilities, and the absence of strict enforcement of sanctions, resulting in some community members still practicing open defecation in rivers. Meanwhile, Hambuku Tengah Village demonstrates better implementation, having been designated as an STBM Village and declared 100% free from open defecation, although several river latrines remain and are used for purposes other than defecation. The inhibiting factors in policy implementation include limited budget allocation, inadequate sanitation infrastructure, and low public awareness, while supporting factors consist of the commitment of village officials, support from health workers, and cooperation among related stakeholders. Based on these findings, it is recommended that local and village governments enhance continuous policy socialization, strengthen*

*budgetary support and sanitation infrastructure, and consistently apply standard operating procedures and sanctions to achieve optimal implementation of the Stop BABS policy.*

**Keywords:** *policy implementation, regional regulation, Stop BABS, environmental sanitation*

## PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi salah satu perbandingan dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sejahtera. Selain sebagai indikator kesejahteraan, kesehatan juga termasuk hak asasi manusia yang harus dijamin. Setiap individu berhak memperoleh perhatian dan layanan yang memadai terkait kesehatannya, baik dalam hal kesehatan personal maupun kesehatan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit yang ditularkan melalui lingkungan dan kualitas hidup masyarakat jadi baik.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi masyarakat, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan kesehatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih higienis, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga perubahan perilaku sanitasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik buang air besar sembarangan yang terus menerus dapat memicu berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, tifoid, penyakit kulit, hepatitis A, serta menimbulkan dampak ekonomi akibat biaya pengobatan dan produktivitas yang menurun.

Program Stop BABS menekankan pemberdayaan masyarakat untuk secara mandiri menerapkan perilaku higienis dan sanitasi yang layak. Salah satu pilar penting dalam STBM adalah penghentian buang air besar sembarangan. Pilar ini menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat desa untuk mengubah kebiasaan hidup sehat, serta menekankan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Penerapan program ini didukung oleh bantuan fasilitas sanitasi, seperti pembangunan WC sehat, yang diperoleh melalui alokasi dana APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah.

Dalam praktiknya, penerapan Stop BABS di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan variasi antara desa-desa. Desa Hambuku Pasar, misalnya, menerima bantuan pembangunan WC sehat dari pemerintah antara tahun 2018 hingga 2021. Dari 154 rumah yang ada, masih terdapat 30 rumah yang belum memiliki WC, sehingga sebagian masyarakat tetap menggunakan jamban di sungai. Selain itu, sosialisasi mengenai Perda Stop BABS di desa ini belum berjalan optimal, sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui larangan buang air besar sembarangan. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah maupun desa juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya akses terhadap WC sehat. Di sisi lain, masih belum ada upaya penegakan hukum atau teguran terhadap warga yang melanggar aturan, sehingga praktik BABS di sungai maupun jamban cubluk masih terjadi, terutama pada rumah panggung di tepi sungai.

Sebaliknya, Desa Hambuku Tengah menunjukkan kondisi yang berbeda. Desa ini telah menerima bantuan WC sehat pada tahun 2019 dan telah dinyatakan 100% Stop BABS oleh pemerintah daerah, serta memperoleh sertifikat STBM. Upaya sosialisasi di desa ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan stiker larangan BABS pada rumah warga. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat perbedaan capaian antara Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah dalam implementasi Perda Stop BABS. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala pelaksanaan program, seperti tingkat sosialisasi, keterbatasan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan, dengan studi kasus di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang

memengaruhi keberhasilan program dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Penelitian oleh Moh. Fajar Noorahman (2020) Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum mencapai efektivitas maksimal. Dari segi perilaku masyarakat, program belum mampu mendorong perubahan signifikan karena masih terdapat sebagian warga yang melakukan BABS di berbagai lokasi, terutama karena keterbatasan fasilitas berupa jamban di rumah mereka. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman warga tentang konsekuensi negatif praktik BABS, baik terhadap kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan, sehingga kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak masih rendah. Selain itu, dari sisi pencapaian tujuan program, hasil penelitian menunjukkan bahwa program STBM melalui Stop BABS belum sepenuhnya berhasil. Penyediaan jamban sehat belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh fasilitas tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian warga tetap melakukan BABS di tempat terbuka, sehingga tujuan utama program untuk mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan standar sanitasi di desa belum terpenuhi secara menyeluruh. Aspek kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Penyaluran dana untuk pembangunan jamban sehat dilakukan secara bertahap, sehingga sebagian warga harus menunggu hingga seluruh kebutuhan mereka terpenuhi. Ketidakmerataan pendanaan ini menimbulkan rendahnya kepuasan warga terhadap program, meskipun mereka mengetahui adanya program pemerintah untuk pembangunan fasilitas sanitasi. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jamban sehat masih terbatas, dan dana desa juga digunakan untuk pembangunan fisik lainnya, sehingga jumlah fasilitas yang tersedia belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, dari perspektif perbandingan antara input dan output, penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama. Besarnya dana yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga yang membutuhkan fasilitas sanitasi, sehingga sebagian warga tetap belum memiliki jamban sehat. Meski demikian, kegiatan sosialisasi mengenai program telah dilaksanakan oleh instansi terkait, dan pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh Puskesmas dengan dukungan aparat desa. Namun, pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ini belum mampu menutup kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas yang ada, sehingga tujuan program untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar berhenti melakukan BABS belum tercapai sepenuhnya. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas program STBM sangat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk ketersediaan fasilitas sanitasi, alokasi dana, pemahaman masyarakat terhadap dampak BABS, serta pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, dan pendidikan masyarakat secara konsisten, perubahan perilaku yang diharapkan tidak akan terjadi secara menyeluruh.

Hatta (2021), implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Kecamatan Haur Gading, dengan studi kasus pada Desa Tangkawang, Desa Tuhuran, dan Desa Waringin. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang diperkenalkan oleh Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2020:99), yang mencakup enam ruang lingkup variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementator. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Stop BABS di wilayah tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, norma-norma masyarakat yang belum sepenuhnya diterapkan, serta kebiasaan sebagian warga yang masih melakukan BABS di sungai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, penguatan norma dan aturan dalam masyarakat, serta intensifikasi

sosialisasi kepada warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan 18 orang informan dengan teknik purposive sampling, serta menganalisis data menggunakan kombinasi observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara keseluruhan implementasi Perda Stop BABS di Kecamatan Haur Gading tergolong cukup optimal, yang terlihat dari beberapa indikator, seperti kejelasan tujuan kebijakan, ketepatan sasaran, ketersediaan finansial, sarana dan prasarana, dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, kondisi ekonomi, dukungan elit politik, respons implementor, dan kognisi masyarakat. Namun demikian, beberapa indikator masih kurang optimal, khususnya terkait sumber daya manusia, norma dalam birokrasi, dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran petugas dalam menegakkan norma dan aturan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mencegah praktik BABS dan mendorong penggunaan WC sehat. Selain itu, kerja sama antara dinas kesehatan, Puskesmas, dan desa-desa sekitar juga diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya BABS, termasuk risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan, sehingga masyarakat mampu membuka wawasan, memahami Perda Stop BABS, dan mengubah perilaku mereka menuju sanitasi yang lebih sehat.

Howlett dan Ramesh (2011) dalam Subarsono (2015) menjelaskan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yang saling terkait. Tahap pertama adalah penyusunan agenda, yaitu proses agar suatu masalah dapat menarik perhatian pemerintah dan masuk ke prioritas kebijakan. Tahap kedua adalah formulasi kebijakan, yaitu penyusunan berbagai alternatif kebijakan sebagai solusi atas masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ketiga adalah pembuatan kebijakan, yakni pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk melaksanakan atau menunda suatu kebijakan. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan secara nyata agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai melalui pemanfaatan sumber daya dan prosedur yang ada. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan, yaitu proses menilai hasil dan kinerja kebijakan, termasuk menemukan kendala dan peluang perbaikan di masa mendatang. Kelima tahapan ini membentuk siklus yang saling berkesinambungan, dari identifikasi masalah hingga penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Menurut Laster dan Stewart Jr. yang dikutip dari Reno Affrian (2023) implementasi dapat dipahami sebagai proses sekaligus hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga dari pencapaian tujuan yang ingin diraih. Dengan kata lain, efektivitas implementasi dapat diukur berdasarkan sejauh mana proses pelaksanaan berjalan baik dan apakah hasil akhir (output) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015), implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta sumber daya untuk mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang nyata. Grindle menekankan bahwa dalam implementasi terdapat dua aspek penting, yaitu isi kebijakan (content of policy), yang berkaitan dengan tujuan dan materi kebijakan itu sendiri, serta konteks implementasi (context of implementation), yang mencakup kondisi sosial, politik, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara rinci berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses, interaksi, dan dinamika yang terjadi secara faktual, sehingga setiap fenomena dapat dijelaskan dengan sistematis dan akurat. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian tidak hanya menekankan pada pengumpulan data, tetapi juga pada penyajian informasi yang merefleksikan sifat, karakteristik, dan hubungan antar aspek yang ada dalam objek penelitian.

Hal ini memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan menyajikannya secara logis. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menangkap detail-detail penting yang

mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dan mendekati kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, tipe penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi analisis, interpretasi data, dan kesimpulan yang akan diambil, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai secara tepat dan menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasari oleh hasil pengamatan awal peneliti, yang menunjukkan adanya permasalahan yang relevan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan fokus penelitian. Kedua desa ini dipandang representatif karena kondisi nyata di lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai implementasi program, sehingga temuan penelitian dapat mencerminkan situasi sesungguhnya dan memberikan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang menjadi objek kajian.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian, sehingga pengolahan dan analisisnya dilakukan sendiri, menjamin ketepatan dan keaslian data. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung, berasal dari sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Data ini dapat berupa dokumen, catatan resmi, laporan, atau hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian dimanfaatkan peneliti untuk mendukung, memperkuat, atau melengkapi pemahaman terhadap fenomena yang sedang dikaji. Dengan adanya kedua jenis data ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek atau subjek penelitian, sehingga pengumpulan, pengolahan, dan analisisnya dilakukan sendiri untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Data ini dapat berupa dokumen, catatan resmi, laporan, atau hasil penelitian terdahulu, yang kemudian digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan konteks tambahan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai objek yang diteliti, serta membantu peneliti dalam melakukan analisis secara lebih mendalam dan akurat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dari objek penelitian. Observasi mencatat fenomena di lapangan, wawancara menggali informasi dari responden, dan dokumentasi memanfaatkan dokumen pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menyederhanakan informasi, menemukan pola atau tema, menyusun data secara sistematis, serta memastikan kesimpulan yang dihasilkan valid dan akurat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Pasar Dan Desa Hambuku Tengah)**

Implementasi kebijakan merupakan pembahasan yang berfokus pada bagaimana suatu kebijakan dijalankan dalam praktik. Tahapan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, aktor, serta dinamika sosial dan politik yang menyertainya. Kondisi tersebut menjadikan implementasi sebagai proses yang kompleks dan berpotensi menimbulkan berbagai tantangan di lapangan. Dalam kerangka kebijakan publik, implementasi menempati posisi yang sangat menentukan karena keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan sangat bergantung pada proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu, untuk menelaah implementasi kebijakan secara lebih terarah dan mendalam, penelitian ini

menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi prasyarat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Standar serta tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, ketidakjelasan dalam penetapan standar dan sasaran berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pelaksana, yang pada akhirnya dapat menghambat koordinasi dan memicu konflik dalam proses implementasi kebijakan.

### a. Kejelasan Tugas Kebijakan

Kejelasan tugas memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan pemahaman pelaksana terhadap peran dan tanggung jawabnya. Penyampaian tugas yang jelas akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sedangkan ketidakjelasan dapat menghambat koordinasi dan pencapaian tujuan. Di Desa Hambuku Pasar, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan Perda Stop BABS belum tersampaikan secara optimal, terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui larangan buang air besar di sungai maupun jamban.

Berbeda dengan Desa Hambuku Pasar, hasil wawancara di Desa Hambuku Tengah menunjukkan bahwa penyampaian standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan cukup baik. Masyarakat dinilai telah memahami arah dan tujuan kebijakan, sehingga peran pelaksana dalam menyampaikan ketentuan Perda Stop BABS dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat jamban, masyarakat secara umum telah mengetahui adanya larangan praktik BABS.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tugas pelaksana dan pemahaman masyarakat terhadap standar serta sasaran kebijakan berada pada tingkat cukup optimal, meskipun belum merata sepenuhnya. Masih ditemukannya jamban di beberapa lokasi menunjukkan perlunya penguatan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor penting dalam mencegah perbedaan penafsiran dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

### b. Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan agar implementasi peraturan daerah berjalan terarah. Tujuan Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) diarahkan pada terwujudnya desa yang bebas dari penggunaan jamban tidak sehat. Namun, hasil wawancara di Desa Hambuku Pasar menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tersebut belum dipahami secara optimal oleh masyarakat, yang tercermin dari masih ditemukannya praktik buang air besar di jamban maupun sungai.

Berbeda dengan Desa Hambuku Pasar, hasil wawancara dan observasi di Desa Hambuku Tengah menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan kebijakan Perda Stop BABS dengan cukup baik. Secara umum, masyarakat mengetahui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan praktik BABS, sehingga pelaksanaannya dinilai berjalan relatif lebih baik, meskipun masih terdapat jamban di beberapa lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan Perda Stop BABS belum sepenuhnya merata. Masih adanya masyarakat yang melakukan BABS menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan pentingnya kejelasan standar dan sasaran kebijakan dalam mendukung efektivitas implementasi.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan merupakan unsur penting dalam implementasi karena menentukan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung, akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai karena menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi. Hasil wawancara dan observasi di Desa Hambuku Pasar menunjukkan bahwa pelaksana Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) telah menjalankan perannya dengan cukup baik melalui pendekatan kepada masyarakat serta upaya mendorong kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dari para implementor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Hambuku Tengah telah berjalan dengan baik dan memberikan dukungan yang optimal. Hal ini sejalan dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa kinerja implementor tergolong memadai serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat terhadap penerapan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan tergolong optimal. Hal ini terlihat dari kemampuan para implementor dalam melaksanakan kebijakan pemerintah melalui pendekatan kepada masyarakat serta upaya mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran sumber daya implementor telah berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

### b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dana untuk mencapai tujuan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan WC sehat tidak dibiayai oleh puskesmas, melainkan bersumber dari dana desa, sementara puskesmas berperan dalam sosialisasi dan monitoring. Di Desa Hambuku Pasar, sumber daya finansial dinilai belum optimal karena belum seluruh masyarakat mampu membangun WC secara mandiri dan realisasi bantuan dana desa masih terbatas, sehingga pelaksanaan Perda Stop BABS masih menghadapi kendala.

Berbeda dengan Desa Hambuku Tengah, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya finansial tergolong memadai. Sebagian besar masyarakat telah mampu membangun WC secara mandiri dan didukung oleh dana desa untuk pembangunan maupun perbaikan WC yang tidak layak. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif baik turut menunjang tersedianya sarana sanitasi, sehingga implementasi kebijakan Stop BABS di desa ini berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah, dapat disimpulkan bahwa sumber daya nonmanusia berupa finansial berada pada kategori cukup optimal. Namun, keterbatasan kuota bantuan WC masih menjadi hambatan dalam mewujudkan target 100% bebas BABS. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa dukungan sumber daya, khususnya pendanaan, merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tingkat koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi peran antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

#### a. Dukungan Instansi Lain

Implementasi Peraturan Daerah tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) membutuhkan dukungan dari berbagai instansi terkait, sehingga koordinasi dan kerja sama antar lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Hambuku Pasar, dukungan dari puskesmas, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat tergolong optimal. Sinergi antarinstansi ini mempermudah pelaksanaan kebijakan, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memastikan program Stop BABS dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

Di Desa Hambuku Tengah, hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan dukungan antarorganisasi berjalan dengan baik. Keterlibatan puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat terlihat aktif dan positif, sehingga koordinasi antarinstansi berjalan efektif dan pelaksanaan Perda Stop BABS dapat berlangsung secara optimal. Sinergi ini membantu mengatasi kendala di lapangan dan memperkuat penerapan kebijakan di masyarakat.

Secara keseluruhan, data gabungan dari kedua desa menunjukkan bahwa dukungan antarorganisasi dalam implementasi kebijakan sudah tergolong optimal. Keberhasilan program, baik dalam pembangunan fasilitas maupun penerapan peraturan, tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menyukseskan program tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa hubungan antarinstansi, khususnya dukungan dari lembaga lain, merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

#### b. Koordinasi Dengan Instansi Lain

Koordinasi menjadi kunci dalam implementasi kebijakan publik untuk meminimalkan kesalahan pelaksanaan. Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Sanitasi UPT Puskesmas Rawat Inap Alabio dan observasi di Desa Hambuku Pasar, koordinasi antara puskesmas, aparat desa, dan masyarakat berjalan baik. Sosialisasi Perda Stop BABS telah dilakukan secara efektif sehingga masyarakat cukup memahami ketentuan tersebut, sementara hubungan antar instansi mulai dari kabupaten, kecamatan, puskesmas, hingga pemerintah desa terjalin efisien, mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Di Desa Hambuku Tengah, koordinasi antara puskesmas, aparat desa, masyarakat, dan instansi terkait termasuk PKK juga berjalan baik. Sosialisasi Perda Stop BABS terlaksana sehingga masyarakat mulai memahami ketentuan tersebut, dan praktik jamban yang tidak memenuhi standar kesehatan mulai berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi di wilayah ini sudah optimal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Perda Stop BABS sudah berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama berbagai pihak diperlukan agar pembangunan dan kebijakan terlaksana sesuai arahan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa hubungan dan dukungan antar organisasi merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga koordinasi antar instansi sangat krusial untuk mewujudkan program 100% Bebas BABS.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana yang kompeten, termotivasi, dan memahami peran serta tanggung jawabnya akan

mendukung kelancaran kebijakan, sedangkan agen yang kurang memadai dapat menghambat pencapaian tujuan.

a. Struktur Birokrasi

Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan, di mana kinerja yang tegas dan disiplin sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Di Desa Hambuku Pasar, implementor dari puskesmas dan pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsi sesuai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan struktur birokrasi terkait implementasi perda di desa tersebut sudah berjalan dengan baik dan dapat dikategorikan optimal.

Di Desa Hambuku Tengah, para implementor juga menjalankan tugas sesuai ketentuan perda dan menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Struktur birokrasi di desa ini berjalan optimal karena setiap instansi melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara tepat, baik dalam penyuluhan maupun penerapan kebijakan.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sudah berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi, sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

b. Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Birokrasi

Pola hubungan antarinstansi mencerminkan keterkaitan kegiatan yang terjalin untuk mencapai tujuan bersama. Di Desa Hambuku Pasar, hubungan birokrasi antara puskesmas, pemerintah desa, dan instansi terkait berjalan baik dan saling bekerja sama, misalnya dalam upaya mengurangi praktik BABS. Meskipun pola hubungan di masyarakat masih kurang mendukung karena kebiasaan lama, hubungan antarimplementor tetap terjalin baik, sehingga secara keseluruhan pola hubungan birokrasi dapat dikategorikan sudah optimal.

Di Desa Hambuku Tengah, hubungan antarinstansi dan implementor juga berjalan baik, mulai dari pemerintah desa, puskesmas, kecamatan, hingga kabupaten. Masyarakat masih dipengaruhi kebiasaan lama, namun kerja sama antarinstansi memastikan penerapan Perda Stop BABS berjalan efektif. Secara keseluruhan, pola hubungan dalam birokrasi di desa ini dapat dikategorikan optimal.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa pola hubungan antarorganisasi dalam implementasi program sudah berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi, pola hubungan, dan norma-norma, sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

c. Norma Dan Aturan Yang Terjadi Dalam Birokrasi

Norma-norma berperan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam implementasi kebijakan, sehingga agen pelaksana harus tegas dan disiplin terhadap aturan serta sanksi hukum. Di Desa Hambuku Pasar, norma birokrasi sudah sesuai ketentuan, namun norma masyarakat masih bertentangan dengan Perda Stop BABS karena sanksi bagi pelanggar belum diterapkan secara optimal, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan belum maksimal.

Di Desa Hambuku Tengah, norma birokrasi cukup sesuai ketentuan, dan pemerintah desa telah memberikan larangan serta mendorong masyarakat menggunakan WC sehat. Meskipun norma masyarakat masih bertentangan dengan Perda, penerapan aturan di tingkat birokrasi dapat dikategorikan cukup optimal dalam mendukung implementasi Perda Stop BABS.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa implementasi norma-norma masih kurang optimal karena sebagian masyarakat masih

melanggar aturan, misalnya melakukan BABS di sungai atau jamban. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, termasuk norma-norma, struktur birokrasi, dan pola hubungan, memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

## 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sosial berkaitan dengan kebiasaan dan partisipasi masyarakat, ekonomi dengan kemampuan finansial, dan politik dengan dukungan pemerintah serta stabilitas wilayah.

### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial berkaitan dengan kebiasaan, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan, yang memengaruhi efektivitas Perda Stop BABS. Di Desa Hambuku Pasar, kondisi sosial masyarakat masih belum optimal karena rendahnya kesadaran dan kebiasaan lama BAB di sungai membuat implementasi kebijakan sulit diterapkan secara menyeluruh.

Di Desa Hambuku Tengah, kondisi sosial masyarakat tergolong cukup optimal. Tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi berhasil mengubah kebiasaan lama, sehingga warga sudah tidak lagi menggunakan jamban di sungai untuk BAB, sehingga partisipasi masyarakat mendukung keberhasilan implementasi Perda BABS.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop BABS tergolong kurang optimal. Hal ini disebabkan kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung, sehingga keberhasilan perda sangat bergantung pada partisipasi dan kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku.

### b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Di Desa Hambuku Pasar, ekonomi masyarakat masih rendah sehingga penerapan perda mengalami kendala. Pemerintah desa telah mengupayakan bantuan melalui pembangunan WC sehat untuk mendukung Program 100% Bebas BABS, namun secara keseluruhan indikator ekonomi dalam implementasi perda ini masih kurang optimal.

Di Desa Hambuku Tengah, sebagian besar masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga penerapan perda berjalan dengan baik. Pemerintah desa tetap memberikan bantuan pembangunan WC bagi warga kurang mampu untuk mendukung program, meskipun sebagian besar warga sudah mampu secara mandiri. Dengan demikian, indikator ekonomi di desa ini dapat dikatakan sudah optimal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa implementasi perda masih dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama dalam penyediaan sarana sanitasi, sehingga faktor ekonomi lingkungan memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program 100% Bebas BABS.

### c. Kelompok-Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan, seperti pemerintah dan lembaga terkait, berperan dalam mendukung pelaksanaan Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk memastikan implementasi berjalan lancar. Di Desa Hambuku Pasar, elit politik tidak memengaruhi pelaksana, tetapi berperan penting dalam penerapan kebijakan terhadap masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah memengaruhi pelaksanaan perda, sehingga peran pemerintah menjadi krusial, dan indikator politik dapat dikatakan cukup optimal.

Di Desa Hambuku Tengah, kondisi serupa terjadi, di mana elit politik tidak memengaruhi pelaksana, namun berperan dalam penerapan kebijakan terhadap masyarakat terkait Stop BABS. Peran pemerintah penting dalam implementasi perda, sehingga indikator politik di desa ini juga tergolong cukup optimal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa penerapan Perda Stop BABS cukup optimal karena didukung pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan. Dukungan elit politik membantu memastikan perda diterapkan kepada masyarakat, sehingga keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keterlibatan pihak-pihak tersebut.

## 6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor adalah sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### a. Respon Implementor

Dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), diperlukan respons yang baik dari para implementor agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan pelaksana memahami peran serta tanggung jawabnya. Di Desa Hambuku Pasar, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementor merespons perda dengan baik, menerima kebijakan karena bertujuan untuk kesehatan masyarakat, sehingga indikator respon implementor dapat dikatakan sudah optimal. Dukungan pemerintah desa dan masyarakat turut memperkuat efektivitas pelaksanaan.

Di Desa Hambuku Tengah, implementor juga merespons perda dengan baik dan menerima kebijakan untuk kesehatan masyarakat. Respon positif ini mempermudah penerapan perda sehingga pelaksanaan berjalan sesuai harapan pemerintah. Dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat, indikator respon implementor di desa ini dapat dikatakan sudah optimal.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop BABS tergolong sudah optimal karena penerapan kebijakan mendapat respon positif dari pelaksana. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa disposisi implementor merupakan salah satu dari enam variabel implementasi, menekankan pentingnya sikap dan respon pelaksana dalam penerapan peraturan daerah.

### b. Kognisi (Pemahaman)

Para agen pelaksana perlu memahami isi dan tujuan kebijakan agar dapat menjalankan Peraturan Daerah tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) secara tepat dan efektif. Di Desa Hambuku Pasar, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana sudah memahami isi perda dan menjalankan tugas sesuai fungsi, meskipun masih ada sebagian yang kurang memahami maksud perda. Dengan demikian, indikator pemahaman di desa ini dapat dikatakan cukup optimal.

Di Desa Hambuku Tengah, sebagian besar pelaksana juga sudah memahami isi perda dan melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing, meskipun ada sebagian yang kurang memahami maksud dari perda. Oleh karena itu, indikator pemahaman di desa ini juga dapat dikategorikan sudah optimal.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tergolong sudah optimal karena para pelaksana sebagian besar sudah memahami isi perda. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa disposisi implementor, termasuk kognisi atau pemahaman pelaksana, merupakan salah satu dari enam variabel penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Pasar Dan Desa Hambuku Tengah)**

### 1. Faktor Penghambat

#### a. Norma dan Aturan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih kurang optimal karena masih ada masyarakat yang melanggar aturan dengan BAB di sungai atau jamban, sehingga penerapan perda belum berjalan sepenuhnya. Kondisi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma dan peran agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi dan pola hubungan antarinstansi, yang semuanya memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, meliputi struktur birokrasi, pola hubungan, dan norma, menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program.

b. Kondisi Sosial

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih kurang optimal karena kondisi sosial masyarakat belum mendukung, ditandai dengan rendahnya kesadaran dan kebiasaan lama BAB di sungai. Keberhasilan penerapan perda sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, karena partisipasi, pengetahuan, dan sikap warga menjadi faktor penting dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

c. Kondisi Ekonomi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih kurang optimal karena kondisi ekonomi masyarakat belum memadai. Keterbatasan ekonomi ini menjadi kendala dalam penerapan perda, terutama dalam penyediaan sarana sanitasi, sehingga keberhasilan pelaksanaan perda sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lingkungan masyarakat.

2. Faktor Pendukung

a. Kejelasan Tugas

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, menunjukkan bahwa kejelasan tugas pelaksana terkait standar dan sasaran kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sudah cukup tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari jawaban para informan yang menyatakan bahwa perda sudah cukup diketahui, meskipun masih terdapat beberapa jamban di sekitar wilayah. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa salah satu variabel penting dalam implementasi adalah kejelasan standar dan sasaran kebijakan, agar tidak terjadi multi-interpretasi yang dapat menimbulkan konflik antar agen pelaksana.

b. Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, menunjukkan bahwa implementasi tujuan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dapat dikatakan cukup optimal. Meskipun ada sebagian masyarakat yang mengetahui perda tersebut, mayoritas masih belum memahami sehingga masih melakukan BAB di jamban. Hal ini disebabkan sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan dengan jelas. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas agar tidak terjadi multi-interpretasi yang dapat menimbulkan konflik antar agen pelaksana.

c. Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah sudah berjalan cukup optimal karena sumber daya pelaksana

(implementor) mampu menerapkan kebijakan pemerintah dengan pendekatan kepada masyarakat serta mendorong kepatuhan terhadap perda. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn, yang menyebut salah satu dari enam variabel implementasi adalah sumber daya. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting, karena tanpa pelaksana yang memahami dan mendukung kebijakan, implementasi perda tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

d. Sumber Daya Finansial

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa sumber daya non-manusia berupa finansial tergolong cukup optimal. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian program 100% Bebas BABS, terutama terkait keterbatasan kuota penerima bantuan WC. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn yang menyebut salah satu dari enam variabel implementasi adalah sumber daya, di mana sumber daya non-manusia, khususnya finansial, memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

e. Dukungan Instansi Lain

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah menunjukkan bahwa implementasi sudah tergolong optimal karena pelaksanaan pembangunan dan kebijakan memerlukan dukungan dari pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam mensukseskan program. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn yang menyebut salah satu dari enam variabel implementasi adalah hubungan antar organisasi, di mana dukungan instansi lain sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

f. Kordinasi Dengan Instansi Lain

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi sudah tergolong optimal karena pembangunan dan pelaksanaan kebijakan memerlukan koordinasi lintas instansi agar berjalan sesuai arahan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn yang menyebut salah satu dari enam variabel implementasi adalah hubungan dan dukungan antar organisasi, di mana koordinasi antarinstitusi menjadi kunci agar program 100% Bebas BABS dapat terlaksana dengan sukses.

g. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi sudah tergolong optimal karena setiap instansi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Van Mater dan Van Horn yang menyatakan bahwa salah satu dari enam variabel implementasi adalah karakteristik agen pelaksana, di mana struktur birokrasi yang jelas dan tertata akan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

h. Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Birokrasi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi sudah tergolong optimal, terlihat dari pola-pola hubungan yang terjalin baik antar organisasi. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn yang menyebutkan bahwa salah satu dari enam variabel implementasi adalah karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, pola hubungan, dan norma-norma, yang semuanya berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program.

i. Kelompok-Kelompok Kepentingan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan cukup optimal, karena pelaksanaan perda membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn, yang menyebut salah satu dari enam variabel implementasi adalah kepentingan (elit politik), di mana keberhasilan suatu perda sangat bergantung pada keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan.

j. Respon Implementor

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tergolong sudah optimal, karena penerapan perda mendapat respon positif dari para pelaksana. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn, yang menyebut disposisi implementor sebagai salah satu dari enam variabel implementasi, di mana indikator ini menekankan pentingnya sikap dan respons pelaksana dalam melaksanakan peraturan daerah.

k. Kognisi (Pemahaman)

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah di Kecamatan Sungai Pandan menunjukkan bahwa implementasi Perda Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tergolong sudah optimal, karena para pelaksana sudah memahami isi dan tujuan perda. Hal ini sejalan dengan teori Van Mater dan Van Horn, yang menyebut disposisi implementor sebagai salah satu dari enam variabel implementasi, di mana indikator ini menekankan pentingnya pemahaman pelaksana dalam menerapkan peraturan daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Sungai Pandan, khususnya di Desa Hambuku Pasar dan Desa Hambuku Tengah, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi perda ini tergolong cukup optimal. Di Desa Hambuku Pasar, dari 14 indikator yang menjadi acuan, terdapat beberapa yang masih mengalami kendala, yaitu norma dan aturan, kondisi sosial, dan ekonomi. Sementara di Desa Hambuku Tengah, mayoritas indikator berjalan lancar karena desa ini sudah dikategorikan bebas BABS. Dengan demikian, meskipun ada beberapa indikator yang belum optimal, secara umum implementasi perda di kedua desa dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Sub-variabel yang sudah optimal meliputi kejelasan tugas dan tujuan kebijakan yang cukup tersampaikan kepada masyarakat, sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik, dukungan dan koordinasi antar instansi yang berjalan efektif, struktur birokrasi dan pola hubungan agen pelaksana yang baik, serta respon dan pemahaman implementor yang mendukung kelancaran pelaksanaan perda. Selain itu, peran politik atau kelompok kepentingan juga berfungsi cukup optimal dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan.

Adapun faktor yang menghambat implementasi perda antara lain norma dan aturan di masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung, kebiasaan sosial masyarakat yang masih melakukan BABS, serta kondisi ekonomi sebagian warga yang tergolong menengah ke bawah sehingga sulit untuk membangun WC pribadi. Faktor pendukung implementasi antara lain tersampainya sasaran dan tujuan kebijakan, tersedianya sumber daya manusia dan finansial yang memadai, dukungan dan koordinasi antarinstansi yang baik, struktur birokrasi serta pola hubungan yang berjalan sesuai fungsi, keterlibatan elit politik, serta respon dan pemahaman positif dari para implementor. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kendala, implementasi perda Stop BABS di kedua desa telah berlangsung cukup optimal dan mendukung tercapainya program 100% bebas BABS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2021) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*, CV. Bintang Semesta Media.
- AG. Subarsono (2015) *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta.
- Anonim (2016) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)*.
- Hatta (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Langkawang, Desa Junuran, dan Desa Waringin)*. STIA Amuntai.
- Noorahman, M.F. (2020) *Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Desa Pawalutan Kecamatan Banjarang*. STIA Amuntai.
- Pasalong, H. (2016) *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabe. Bandung.
- Sugiyono (2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.